



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sufian Suri, S.T., M.A.P.**

NIP : 19690319 199303 1 004

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Rahmadi**

NIP : 19760302 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Sufian Suri, S.T., M.A.P.
NIP. 19690319 199303 1 004

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

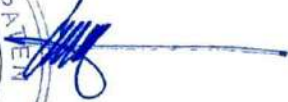
Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah)	Komponen Penilaian : - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal	27,40 25,05 11,30 16,30
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.914.304.377

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Drs. Rahmadi
 NIP. 19760302 199412 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

Sufian Suri, S.T., M.A.P.
 NIP. 19690319 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nor Izatil Hasanah, S.Sos.**

NIP : 19700127 198903 2 003

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Rahmadi**

NIP : 19760302 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003



Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga desa yang berprestasi	17%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 25.000.000.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 515.855.002

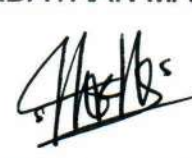
Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.**

NIP : 19720717 199903 1 007

Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Rahmadi**

NIP : 19760302 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA


Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007



Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang tertata sesuai dengan ketentuan	65%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penataan Desa	Rp. 15.037.800
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 1.680.824.700
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 740.899.850

Rantau, 03 Maret 2025



Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA**

Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.**

NIP : 19820621 201001 1 017

Jabatan : Kepala Bidang PPUED

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Rahmadi**

NIP : 19760302 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PPUED

M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

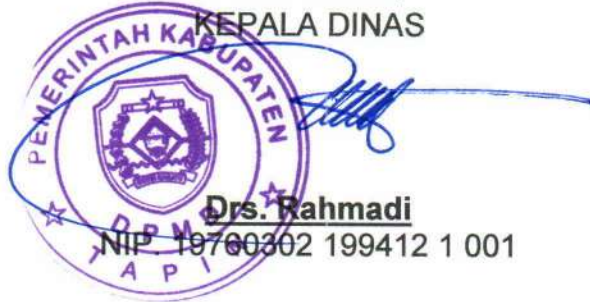
Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Perkembangan Status BUMDes Maju	6%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 298.443.300
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 451.556.280

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Drs. Rahmadi
NIP. 19760302 199412 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PPUED

M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Enny Hidya, S.Th.I.**

NIP : 19790410 201406 2 007

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Nor Izatil Hasanah, S.Sos.**

NIP : 19700127 198903 2 003

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA

Enny Hidya S.Th.I.
NIP. 19790410 201406 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	82%
2	Terlaksananya Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga masyarakat yang dibina	100%
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditindaklanjuti	50%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 621.752.252

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT



Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA



Enny Hidya S.Th.I.
NIP. 19790410 201406 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fathur Rahman, S.E.**

NIP : 19841031 201001 1 012

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Nor Izatil Hasanah, S.Sos.**

NIP : 19700127 198903 2 003

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA

Fathur Rahman, S.E.
NIP. 19841031 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kerjasama kelembagaan antar desa	Persentase kelembagaan antar desa yang bekerja sama	100%
2	Terlaksananya peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa dalam kabupaten	Persentase Badan Kerjasama Antar Desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	72%
3	Meningkatnya kerjasama Badan Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga	Persentase MoU yang dihasilkan	45%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Rp 621.752.252
2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Rp 25.000.000.000

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**



Nor Izatil Hasanah, S.Sos.
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
**PENGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA**



Fathur Rahman, S.E.
NIP. 19841031 201001 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Didin Muhtadin, S.A.P.**

NIP : 19730920 199603 1 001

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.**

NIP : 19720717 199903 1 007

Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA

Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA

Didin Muhtadin, S.A.P.
NIP. 19730920 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

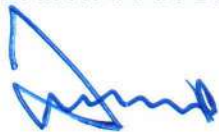
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan	90 %
2	Terlaksananya pelatihan perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	126 org
3	Meningkatnya Tata kelola Aset desa	Persentase desa yang melakukan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan	90 %
4	Terlaksananya pelatihan perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang dilatih	126 org
5	Terlaksananya monitoring laporan keuangan	Jumlah desa yang dilakukan monitoring laporan keuangan	126 desa
6	Terlaksananya evaluasi laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang di evaluasi	1 lap
7	Terlaksananya monitoring laporan aset desa	Jumlah desa yang dilakukan monitoring laporan aset desa	126 desa
8	Terlaksananya evaluasi laporan aset desa	Jumlah laporan aset desa yang di evaluasi	2 lap
9	Meningkatnya pengelolaan wilayah desa	Persentase wilayah desa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90 %
10	Terlaksananya penegasan batas desa sesuai ketentuan	Persentase desa yang melaksanakan penegasan batas desa sesuai ketentuan	90 %
11	Terlaksananya penetapan batas desa sesuai ketentuan	Persentase desa yang melaksanakan penetapan batas desa sesuai ketentuan	0 %
12	Meningkatnya kapasitas aparatur desa	Persentase aparatur desa yang sesuai ketentuan yang berlaku	90 %
13	Meningkatnya pengetahuan atau pemahaman tentang tata cara pengangkatan perangkat desa	Persentase jumlah kepala desa yang diberikan sosialisasi	90%

14	Terlaksananya pelatihan tata kelola desa	Persentase aparatur desa yang dilatih	80 %
----	--	---------------------------------------	------

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 15.037.800
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 740.899.850
3.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Rp 1.680.824.700

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA



Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA



Didin Muhtadin, S.A.P.
NIP. 19730920 199603 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Marisa Anti Raini, S.Pi.**

NIP : 19791205 201001 2 010

Jabatan : Analis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.**

NIP : 19820621 201001 1 017

Jabatan : Kepala Bidang PPUED

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PPUED

M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Marisa Anti Raini, S.Pi.
NIP. 19791205 201001 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	Persentase desa yang menghasilkan inovasi	50%
		Persentase desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna	45%
2	Meningkatnya posyantek dan posyantekdes yang aktif	Persentase posyantek dan posyantekdes yang aktif	50%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi dalam posyantek dan posyantekdes	Persentase posyantek dan posyantekdes yang tertib administrasi	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 257.515.950

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PPUED



M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**



Marisa Anti Raini, S.Pi.
NIP. 19791205 201001 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Serlia Noor, S.Pi.**
NIP : 19791204 201406 1 001
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.**
NIP : 19820621 201001 1 017
Jabatan : Kepala Bidang PPUED

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

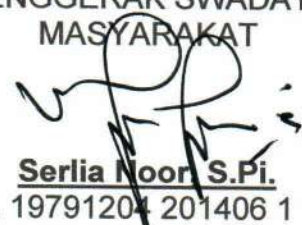
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PPUED


M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT


Serlia Noor, S.Pi.
NIP. 19791204 201406 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Bumdes dan Bumdesma yang aktif	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang aktif	74%
2	Meningkatnya Bumdes dan Bumdesma yang menghasilkan PADes	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang menghasilkan PADes	61%
3	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan Bumdes dan Bumdesma	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang dibina	100%
4	Meningkatnya sumber daya pengelola Bumdes dan Bumdesma	Persentase pengelola Bumdes dan Bumdesma yang memahami tugas dan fungsi	80%
5	Meningkatnya tata kelola administrasi, laporan keuangan Bumdes dan Bumdesma	Persentase Bumdes dan Bumdesma yang tertib administrasi	45%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Rp 194.040.330
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 298.443.300

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PPUED



M.E. Iwan Satriyansyah, S.Sos.
NIP. 19820621 201001 1 017

Pihak Pertama,
**PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT**



Serlia Noor, S.Pi.
NIP. 19791204 201406 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.**

NIP : 19710703 199303 2 010

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sufian Suri, S.T., M.A.P.**

NIP : 19690319 199303 1 004

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

Sufian Suri, S.T., M.A.P.
NIP. 19690319 199303 1 004

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase Kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas ASN	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.067.329.250
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.994.027.625
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 238.072.652
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.410.800

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Sufian Suri, S.T., M.A.P.
NIP. 19690319 199303 1 004

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dina Handayani, A.Md.**
NIP : 19781009 200904 2 002
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sufian Suri, S.T., M.A.P.**
NIP : 19690319 199303 1 004
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

Sufian Suri, S.T., M.A.P.
NIP. 19690319 199303 1 004

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Dina Handayani, A.Md.
NIP. 19781009 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggung jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.939.950
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.994.027.625

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



Sufian Suri, S.T., M.A.P.
NIP. 19690319 199303 1 004

Pihak Pertama,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



Dina Handayani, A.Md.
NIP. 19781009 200904 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Agil Anwari, S.I.P.**

NIP : 19940813 202012 1 005

Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.**

NIP : 19720717 199903 1 007

Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA

Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS DESA DAN KELURAHAN

Muhammad Agil Anwari, S.I.P.
NIP. 19940813 202012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi tata wilayah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	1 Desa
2	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Dokumen
3	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	5 Dokumen
4	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	126 Dokumen
5	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	126 Orang
6	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	1 Laporan
7	Terlaksananya fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Laporan
8	Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen
9	Terlaksananya pembinaan peningkatan kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	126 Orang
10	Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	110 Desa

11	Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	1 Dokumen
----	--	--	-----------

No.	Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Rp	15.037.800
2.	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp	50.000.000
3.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Rp	106.158.700
4.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Rp	18.682.500
5.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp	139.516.300
6.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp	14.688.550
7.	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp	18.471.200
8.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp	14.692.900
9.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Rp	150.823.900
10.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp	16.933.200
11.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp	33.487.600

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG BINA
PEMERINTAHAN DESA

Tomy Yulian Arrizky, S.E., M.M.
NIP. 19720717 199903 1 007

Pihak Pertama,
ANALIS DESA DAN
KELURAHAN

Muhammad Agil Anwari, S.I.P.
NIP. 19940813 202012 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nurul Fajriah, S.I.P.**
NIP : 19960326 202012 2 009
Jabatan : Analis Desa dan Kelurahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Didin Muhtadin, S.A.P.**
NIP : 19730920 199603 1 001
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

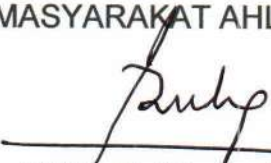
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT AHLI MUDA


Didin Muhtadin, S.A.P.
NIP. 19730920 199603 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS DESA DAN KELURAHAN


Nurul Fajriah, S.I.P.
NIP. 19960326 202012 2 009

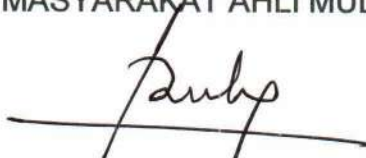
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	4 Dokumen
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	4 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	2 Dokumen
4	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Rp 1.680.824.700
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 146.435.000
3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 16.172.300
4.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Rp 14.837.700

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**PENGERAK SWADAYA
 MASYARAKAT AHLI MUDA**


Didin Muhtadin, S.A.P.
 NIP. 19730920 199603 1 001

Pihak Pertama,
**ANALIS DESA DAN
 KELURAHAN**


Nurul Fajriah, S.I.P.
 NIP. 19960326 202012 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Indra Noor Fajri Kurniawan, S.E.**

NIP : 19880809 202012 1 003

Jabatan : Pranata Barang Jasa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.**

NIP : 19710703 199303 2 010

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
PRANATA BARANG JASA

Indra Noor Fajri Kurniawan, S.E.
NIP. 19880809 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Paket
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
4	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 38.926.400
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 108.908.800
3.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 25.887.850
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 132.224.600
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 365.299.500

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
PRANATA BARANG JASA



Indra Noor Fajri Kurniawan, S.E.
NIP. 19880809 202012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lutfi Awwali, A.Md.**

NIP : 19860215 202012 1 004

Jabatan : Pengelola dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.**

NIP : 19710703 199303 2 010

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
PENGELOLA DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

Lutfi Awwali, A.Md.
NIP. 19860215 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	744 Laporan
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit
3	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 868.716.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 94.050.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.360.800

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
**PENGELOLA DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH**



Lutfi Awwali, A.Md.
NIP. 19860215 202012 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Hartono**
NIP : 19730710 200701 1 015
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.**
NIP : 19710703 199303 2 010
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

Rudi Hartono
NIP. 19730710 200701 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
2	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
4	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang dan Pengadaan yang di sediakan	6 Paket
5	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 12.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp 75.297.452
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 150.775.200
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 22.890.200
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 2.000.000

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**



Hj. Sri Yulianthi, S.Sos.
NIP. 19710703 199303 2 010

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



Rudi Hartono
NIP. 19730710 200701 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Novariyanti, A.Md.**

NIP : 19891113 202012 2 003

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dina Handayani, A.Md.**

NIP : 19781009 200904 2 002

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN

Sri Novariyanti, A.Md.
NIP. 19891113 202012 2 003

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

Dina Handayani, A.Md.
NIP. 19781009 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 16.939.950
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.547.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Rp 3.621.000

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Dina Handayani, A.Md.
NIP. 19781009 200904 2 002

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN



Sri Novariyanti, A.Md.
NIP. 19891113 202012 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mulyadi, S.A.P.**

NIP : 19760314 200701 1 024

Jabatan : Analis Prasarana Perkotaan dan Perdesaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Marisa Anti Raini, S.Pi**

NIP : 19791205 201001 2 010

Jabatan : Analis Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
ANALIS PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Marisa Anti Raini, S.Pi.
NIP. 19791205 201001 2 010

Pihak Pertama,
ANALIS PRASARANA PERKOTAAN
DAN PERDESAAN

Mulyadi, S.A.P.
NIP. 19760314 200701 1 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan
2	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	374 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 257.515.950
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.983.859.625

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
**ANALIS PENGEMBANGAN ILMU
 PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**



Marisa Anti Raini, S.Pi.
 NIP. 19791205 201001 2 010

Pihak Pertama,
**ANALIS PRASARANA
 PERKOTAAN DAN PERDESAAN**



Mulyadi, S.A.P.
 NIP. 19760314 200701 1 024



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hamberan**

NIP : 19701010 200701 1 048

Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Serlia Noor, S.Pi.**

NIP : 19791204 201406 1 0017

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT

Serlia Noor, S.Pi.

NIP. 19791204 201406 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
EKONOMI PEDESAAN

Hamberan

NIP. 19701010 200701 1 048

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah Bumdes dan Bumdesma yang bekerjasama dengan pihak ketiga	1 Dokumen
2	Meningkatnya legalitas hukum Bumdes dan Bumdesma	Persentase bumdes dan bumdesma yang berbadan hukum	45%
3	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengajuan legalitas hukum Bumdes dan Bumdesma	Jumlah dokumen pengajuan legalitas hukum yang dimonitoring	1 Dokumen
4	Terlaksananya fasilitasi pengajuan legalitas hukum Bumdes dan Bumdesma	Jumlah Bumdes dan Bumdesma yang difasilitasi legalitas pengajuan hukumnya	1 Dokumen
5	Terlaksananya pemberian reward Bumdes yang menghasilkan PADes	Jumlah Bumdes yang mendapatkan reward	56%
6	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	1 Dokumen
7	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 194.040.330
2.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Rp 298.443.300

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT



Serlia Noor, S.Pi.

NIP. 19791204 201406 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
EKONOMI PEDESAAN



Hamberan

NIP. 19701010 200701 1 048



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Mabdiannoor, S.Sos.**

NIP : 19960616 202421 1 005

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Nor Izatil Hasanah, S.Sos.**

NIP : 19700127 198903 2 003

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Nor Izatil Hasanah, S.Sos
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT

Muhammad Mabdiannoor, S.Sos.
NIP. 19960616 202421 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK, Posyandu, LPM, KPM dan BKAD)	Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK, Posyandu, LPM, KPM dan BKAD)	1 Dokumen
3	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK, Posyandu, LPM, KPM dan BKAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK, Posyandu, LPM, KPM dan BKAD)	5 Lembaga
4	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan		Anggaran
1.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp	25.000.000.000
2.	Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp	213.065.600
3.	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Rp	302.789.402
4.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp	105.897.250

Rantau, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT



Nor Izatil Hasanah, S.Sos
NIP. 19700127 198903 2 003

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT



Muhammad Mabdiannoor, S.Sos.
NIP. 19960616 202421 1 005